**RENCANA KERJA**

**BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN POLDA KEPRI**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

1. LATAR BELAKANG
2. Kondisi Umum

Kebijakan pemerintah Indonesia disusun dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019 dengan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Polri sebagai lembaga pemerintahan di bidang keamanan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra). Tahapan Renstra saat ini memasuki Tahun ke-4 dari Renstra Polri Tahap III Tahun 2015-2019 yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan strategis. Tahapan Renstra Polri tersebut juga disinkronkan dengan RPJMN 2015-2019 dan Grand Strategy Polri yang merupakan amanat dari Reformasi Birokrasi Polri (RBP).

Renstra Polri Tahap III merupakan kelanjutan dari Renstra Polri Tahap I 2005-2009 yang berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern melalui pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan Polri sebagai pelayan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat (trustbuilding) dan Renstra Polri Tahap II 2009-2014 dengan sasaran membangunsinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership building. Pada Renstra 2015-2019 tahap III Polri akanmengimplementasikan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (Strivefor Excellence) dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat danmembangun kerja sama dengan stakeholder terkait.

Sejalan dengan Tujuan pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan visi terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dibidang maritim. Pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyentuh seluruh aspek kehidupan dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada baik pemerintah, swasta dan komponen masyarakat lainnya secara bersinergi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Polda Kepri merupakan bagian dari institusi Polri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan dalam wilayah Provinsi Kepri dan melaksanakan program quick wins yang disinergikan dengan visi Polda Kepri untuk mewujudkan Polda Kepri yang professional, Modern dan terpercaya melalui strategi strive for excellence yang akan diimplementasikan sampai dengan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (excellence).

Pelaksanaan Renstra Polda Kepri 2015-2019 dengan titik sentral pada membangun sinergi dengan seluruh instansi terkait dan komponen masyarakat yang ada di Provinsi Kepri. Strategi pencapaian sasaran akan mengacu pada hal-hal yang telah dicapai pada tahun sebelumnya baik dibidang operasional, pembinaan kekuatan maupun pembangunan kekuatan. Keberhasilan Polda Kepri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan daerah sebagai modal awal dalam pembangunan daerah Kepulauan Riau.

Pelaksanaan Renstra Polda Kepri 2010-2014 sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berjalan cukup baik.Hal ini ditandai dengan kondisi kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali sertadapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya konflik sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait. Polda Kepri secara umum telah dapat mencapai sasaran-sasaran stretegis yang telah direncanakan dalam Renstra Polda Kepri 2010-2014.

Beberapa keberhasilan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada pelaksanaan Renstra Polda Kepri Tahun 2010-2014 yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya di bidang Organisasi yaitu penggelaran struktur Organisasi Kepolisian Daerah yang menganut sistem piramida dalam postur kekuatan Polri yang berstandar professional, bermoral dan modern serta terbangunnya organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta berorientasi kepada masyarakat dengan lapis kekuatan Polda Cukup, Polres Besar, dan Polsek kuat sebagai implementasi pelayanan dengan penguatan tugas dan fungsi unit kerja pada Organisasi Kepolisian Daerah dengan rencana aksi yang dilaksanakan yaitu : Penyusunan Hubungan Tata kerja Polda Kepri dan antar fungsi tingkat kewilayahan dan penyusunan Analisis Beban Kerja.

Keberhasilan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada Renstra Polda Kepri Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari kerja sama seluruh anggota Polda Kepulauan Riau dan jajarannya dengan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh Instansi terkait serta masyarakat Kepulauan Riau.

Di bidang penguatan unit kerja yang menangani fungsi Organisasi tatalaksana pelayanan Publik yaitu, Pembentukan Satpol Air tingkat Polres, Unit lantas Pada Polsek Rural dan Polsubsektor, penyusunan Analisis Beban Kerja, penyusunan kebutuhan personel dan sarana prasarana sesuai kebutuhan Organisasi serta pengembangan Organisasi pada tingkat Polsek dan Polsubsektor.

Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Polri yang professional, bermoral dan patuh hukum, Polda Kepri melaksanakan hal-hal tersebut melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Polri yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai rasio Polri yang ideal. Strategi yang dilaksanakan dalam penambahan anggota baru Polri melalui penerimaan Perwira Polri AKPOL, SIPSS, Brigadir dan Tamtama Polri, yang diterima dari calon berkwalitas terutama aspek moral kepribadian dan intelektual. Dalam proses werving dilakukan secara proporsional bersih, transparan, obyektif dan humanis serta akuntabel dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas. Strategi lain memberikan kesempatan kepada anggota Polda kepri untuk mengembangkan diri dan kemampuan seperti mengikuti pendidikan Sespimti,Sespimen,Sespima dan pembentukan Perwira dari Brigadirserta memberi kesempatan kepada anggota Polda Kepri untukmengikuti Diklat dan sekolah-sekolah kejuruan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana guna memberi dukungan bagi peningkatan Kamtibmas dan pelayanan masyarakat, Polda Kepri telah mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi secara terintergritasi, mengusulkan membangunan fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat.

Dibidang Operasional, secara umum situasi keamanan dan ketertiban wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cenderung stabil dan terkendali situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat,aktivitas Pemerintahan dan kegiatan even Nasionalmaupun Internasional. Pelaksanaan Operasi yang digelar sepanjang tahun 2010-2014 yaitu meliputi Operasi Kepolisian terpusat, Operasi Kepolisian kendali Pusat dan Operasi Kepolisian mandiri kewilayahan serta penggelaran kesiapan Operasional Polda kepri dan jajaran terdiri dari Dalmas,PHHBrimob, Bhabinkamtibmas, hal ini telah dapat menciptakan situasi aman dan tertib serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polda Kepri terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peranannya.

Berbagai kasus kejahatan kriminalitas yang terjadi yaitu konvensional,transnasional, terorisme, kekayaan Negara yang meresahkan masyarakat telah dapat ditindak tegas sesuai dengan prosudur yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia ( HAM ) dan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Demikian juga penanganan kasus narkoba selama pelaksanaan renstra Polda Kepri 2010-2014, jajaran Polda Kepri telah banyak mengungkap kasus-kasus narkoba bersekala nasional maupun Internasional dengan tersangka WNI maupun WNA dengan barang bukti Ganja, extacy dan shabu.

Untuk Bidang pelayanan publik yang terkait lalu lintas sebagai pelaksanaan quick wins di Polda kepri dan satuan kewilayahan dibidang pelayanan SIM,STNK dan BPKB telah disediakan pelayanan keliling dengan mengunakan Bus unit pelayanan SIMcorner diarea perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya serta perpanjangan STNK secara online.

Tahun 2019 adalah merupakan Tahun terakhir pelaksanaan Restra Polda Kepri 2015-2019 yang merupakan Tahap ke III (Strive For Excellent) yang merupakan kelanjutan Renstra Polda Kepri 2010-2014 Tahap II ( Partnership Building ). Pada Tahun 2019akan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan Nasional.

Polda Kepri telah melaksanakan revisi Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2015-2019, sehingga Rorena Polda Kepri sebagai bagian dari Polda Kepri harus menyusun dan menjabarkan Renstra Polda Kepri Tahun 2015-2019 dalam bentuk Renstra Rorena Polda Kepri Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan lingkungan strategis di wilayah Polda Kepri sebagai wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis baik global, regional dan nasional menjadi pertimbangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Rorena Polda Kepri Tahun 2019. Selanjutnya kondisi internal baik Rorena Polda Kepri maupun Polda Kepulauan Riau serta perkembangan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut ;

* + - * 1. **Kondisi Geografis, Demografi dan sumber daya alam**

1. **Geografis**

Letak Geografis Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi tersebut juga mengandung kerawanan terhadap keamanan negara dalam bentuk sengketa perbatasan dan kejahatan lintas negara serta beberapa kejahatan lainnya.

[](file:///F:\..\EKSPOSE\musrenbanbnas2010\Pulau.ppt)

1. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada :

5°,01° Lintang Utara s/d 0°,40°Lintang Selatan.

103°,15° Bujur Timur s/d 109°,10° Bujur Timur.

1. Dengan Batas Wilayah antara lain :

Sebelah Utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Laut Natuna Utara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 251.810,71 Km² dengan luas wilayah daratan 10.595,41 Km² (4,21%), luas wilayah laut/Perairan241.215,30 Km² (95,79%) yangmeliputi 2.408 pulau besar dan kecilterdiri dari:

* belum bernama sebanyak 1.865 pulau;
* bernama sebanyak 543 pulau;
* berpenghuni sebanyak 366 pulau (15%);
* tidak berpenghuni sebanyak 2.042 pulau (85%);
* pulau terluar sebanyak 52 pulau;
* pulau terdepan sebanyak 19 pulau.

1. Curah hujan di wilayah Provinsi Kepri 2000 mm/th dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 82-86 %, musim hujan terjadi pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau antara bulan April s/d Oktober, namun akibat pengaruh pemanasan global, sehingga mengalami pergeseran waktu yang tidak menentu;
2. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal berdirinya adalah 1 Juli 2004 dengan ibukotanya di Kota Tanjungpinang. Kepri terdiri dari2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 3.990 Km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.060.309 jiwa. Letak Kota Batam yang sangat strategis, berhadapan langsung berhadapan langsung dengan Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ)

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan jumlah penduduk sekitar 210.836 jiwa, Kota Tanjungpinang sempat menjadi ibukota Provinsi Riau yang pertama, namun sejalan dengan perkembangannya sesuai dengan SK Mendagri No.5 tanggal 21 Juni 2001 Kota Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonomi;

Kabupaten Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 50 (lima puluh) wilayah Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 58.003,25 Km² dan jumlah penduduk sekitar 70.097 jiwa. Kabupaten Bintan merupakansalah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ), selain juga dikenal sebagai pusat pariwisata terpadu dan memiliki kawasan industri yang terus berkembang;

Kabupaten Karimun dengan letak ibukotanya di Tanjungbalai Karimun, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 (dua puluh sembilan ) Kelurahan dan 42 (empat puluh dua ) Desa dengan luas wilayah sekitar 167.850 Km² dan jumlah penduduk sekitar 260.478 jiwa memiliki keunggulan tersendiri karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga merupakan salah satu basis pertumbuhan IMS – GT (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle) serta merupakan salah satu kawasan *Free Trade Zone* (FTZ);

Kabupaten Lingga dengan ibukota Daek lingga terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan, luas wilayah sekitar211.772 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 97.729 jiwa, daerah Kabupaten Lingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan pertanian;

Kabupaten Natuna letak ibukotanya di Ranai terdiri dari 12 (duabelas) Kecamatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 141.901,2 Km² dan jumlah penduduk sekitar 76.606 jiwa, sedangkan luas lautan 97,72 Km², merupakan daerah yang kaya dengan minyak dan gas bumi;

Kabupaten Anambas yang merupakan pemekaran dari Kab. Natuna letak ibu kotanya di Tarempa terdiri dari 7 Kecamatan dengan jumlah penduduk 43.993 jiwa.

1. **Demografi**

Jumlah Penduduk dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan Tahun 2018 sebanyak **2.028.439** jiwadengan perincian sebagai berikut :

| **No** | **Kabupaten / Kota** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***5*** |
| 1 | Kota Batam | 1.188.985 |
| 2 | Kota Tanjung pinang | 202.215 |
| 3 | Kab. Karimun | 225.298 |
| 4 | Kab. Bintan | 153.020 |
| 5 | Kab. Lingga | 88.591 |
| 6 | Kab. Natuna | 74.520 |
| 7 | Kab. Anambas | 40.414 |
|  | **Jumlah** | **2.028.439** |

1. **Sumber Daya Alam**
2. Potensi Hutan

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat daerah perhutanan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Adapun daerah perhutanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau seperti di Bintan, Lingga dan Natuna. Sedangkan hutan bakau tersebar luas di seluruh pesisir Propinsi Kepulauan Riau.

1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian dan perkebunan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak dijadikan mata pencaharian utama bagi penduduk yang disebabkan tanahnya yang kurang subur dan banyak mengandung bauksit, akan tetapi akhir-akhir ini pemerintah Propinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota menggalakkan wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagai daerah pertanian seperti halnya Pulau Galang, Bintan dan Karimun sebagai penghasil tanaman palawija (sayur-sayuran dan umbi-umbian), cengkeh juga perkebunan sawit yang hasilnya dapat di konsumsi sendiri juga dapat di ekspor ke Luar Negeri.

1. Potensi Kekayaan Laut

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dikelilingi lautan hampir tiga perempat luas wilayahnya. Potensi kekayaan laut cukup besar, sebagian masyarakat penduduk menggunakan mata pencaharian sebagai nelayan dan hasilnya cukup untuk kebutuhan daerah sendiri dan bagi pengusaha ikan juga ada juga yang melakukan pengiriman ke luar daerah seperti jambi juga Medan dan bahkan mengeksport ke Luar Negeri (Malaysia dan Singapore).

1. Pertambangan

* Timah

Tambang Timah terdapat dan masih beroperasi di perairan Prayon Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun dan di Kab. Lingga, yang dikelola oleh :

* PT. Tambang Timah Unit Kundur, dengan jumlah eksport timah ke Singapura sebanyak 3.340 ton
* PT Eunindo Usaha Mandiri di perairan pulau Kenipan Kec. Kundur Barat dengan menggunakan Kapal Isap serta memiliki Smelter di Desa Pangke Kec Pangke
* PT. PENTA INTI MANDIRI, Alamat : Jl. Raja Haji Fisabillah Pantai Pelawan RT. 03 RW. 03 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun Kepulauan Riau 29161, Lokasi Tambang : Blok IV Kec. Karimun dan Kec. Kundur Barat
* PT. Karimun MINING, Alamat : Jl. Nusantara No. 89 Kab. Karimun Kepulauan Riau 29161, Lokasi Tambang : Blok A Kec. Kundur, Blok B Kec. Karimun, Blok C Kec. Tebing.
* Batu Granit

Tambang Batu Granit di Wilayah Provinsi kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Karimun dan Kab. Bintan yang dikelola oleh :

* PT. Karimun GRANITE, Alamat : Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun;
* PT. PASIFIC GRANITAMA, Alamat : Jl. Pangka No. 88 Kec. Meral Tanjung Balai Karimun;
* PT. BUKIT ALAM PERSADA, Alamat : Bukit Jambang Desa Pangke Kec. Meral Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;
* PT. Bukit Granite Mining Mandiri Pongkar Tebing Karimun;
* PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA, Alamat : Bukit Potot Desa Pangka Kec. Meral Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;
* PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA, Alamat : Sememai Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
* DAHANA, Bukit Meninjau Parit Benut Pangke Kec Meral Barat 0777-326054;
* PT. Mitra Investindi Tbk, berlokasi di Bukit Piatu Kecamatan Gunung Kijang, penanggung jawab perusahaan an. DIAH PERTIWI GANDHI;
* PT. Bintan Nusamulti, berlokasi di Bukit Kijang Kecamatan Gunung Kijang, penanggung jawab perusahaan an. Sdr. SAKUR.
* Batu / Biji Besi

PT. Bina Perkasa di Desa Bakong Kec. Singkep Barat seluas 73 Ha, dengan Alamat Perusahaan Komplek Nagoya Garden Blok G No. 2-3 Batam Telp. 0778 457279. (Eksploitasi Bijih Besi).

* Minyak Bumi / Gas

Minyak Bumi yang terkandung di wilayah Kepulauan Riau terletak di wilayah kabupaten Natuna yang berlokasi di laut Cina Selatan dan terletak 296 Km sebelah Barat Pulau Natuna. Pegeboran Minyak Lepas Pantai dilakukan oleh beberapa perusahaan diantaranya:

* PT. MEDCO;
* PT. PRIMER OIL, Jumlah Karyawan terdiri dari 114 (Seratus Empat Belas) Karyawan, Alamat Perusahaan Matak Base Telp. 0215151800
* PT.STAR ENERGIC;
* PT. PAN dengan jumlah Karyawan terdiri dari 185 (sertaus Delapan Puluh Lima) orang dengan jumlah Karyawan Asing Nihil. Alamat Perusahaan di Matak Kecil Desa Payalaman Kab. Anambas Telp. 0772-31328.

1. **Idiologi**:
   * 1. Masyarakat Provinsi Kepri pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, namun sudah ada indikasi kelompok/aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila ( HTI, SYIAH dan GAFATAR);
     2. Di Kepulauan Riau masih terdapat kelompok/suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepri yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir-pinggir pulau wilayah Kepri yang kemungkinan besar belum memiliki agama/kepercayaan (animisme), pendidikan/pengetahuan yang cukup tentang Pancasila sebagai idiologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
     3. Bergesernya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik/lokasi usaha tertentu dengan tujuan melakukan dominasi dalam hal “pengamanan”sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mendompleng nama suku tertentu yang seakan - akan berlatarbelakang SARA.
2. **Politik:**
3. Secara umum situasi politik di Kepri cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. namun terdapat beberapa kebijakan Pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif;
4. Kekosongan Wakil Gubernur Provinsi Kepri terjadi sehubungan telah dilantiknya Wakil Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2016 – 2021 Dr. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si menjadi Gubernur Provinsi Kepri dikarenakan telah meninggalnya Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2016 – 2021 Drs. H. M. SANI, sehingga terjadi manuver politik untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur Prov. Kepri yang berdampak pada gangguan Kamtibmas;
5. Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang;
6. Dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepri. Halini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepri diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing;
7. Rencana pemekaran wilayah terhadap Kab Kep. Kundur, Kota Natuna, Kab. Natuna Selatan, Kab. Natuna Barat yang diusulkan Gubernur Kepri ke Mendagri dengan nomor surat : 130-/0188/set tanggal 26 Februari 2016;
8. Adanya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam, dimana sama-sama memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah Kota Batam. Kedua instansi tersebut berpegang kepada Peraturan Perundang masing-masing sehingga berdampak pada kepastian Hukum dalam berinvestasi.
9. **Ekonomi:**

Tumpang Tindih dan Duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang dimana ada banyak aturan bahkan undang – undang tentang FTZ yang dinilai tidak efektif . Hal tersebut berdampak adanya wacana pembentukan KEK dan pembubaran terhadap BP Batam;

Adanya permasalahan tentang kampung tua yang dimana keberadaan Kampung Tua di Kota Batam sangat dipertahankan oleh masyarakat kota Batam terutama suku asli karena terdapat tapak perkampungan, situs purbakala,kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi,silsilah keluarga melayu yang menginginkan kepastian status dari BP Batam.

Penolakan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memberatkan warga masyarakat Kota Batam;

Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti adanya moda transprotasi berbasis online yang menimbulkan pengaruh positif maupun negative, untuk dampak positif mempermudah dan memberikan kenyamanan masyarakat, sedangkan dampak negative menimbulkan penolakan moda transportasi konvensional;

Wilayah Prov. Kepri bukan daerah penghasil kebutuhan konsumtif (embako) sehingga untuk memenuhi kebutuhan Prov. Kepri menggantungkan supply dari luar Kepri. Hal ini menimbulkan spekulan/import illegal/penyelundupan sembako ke wilayah Prov. Kepri;

Pemasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualismeKewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam);

Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (Over Haull) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN.

1. **Sosial Budaya:**
2. Permasalahan pendirian rumah ibadah dan aktivitasnya di wilayah Kota Batam dan Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah ibadah;
3. Unjuk rasa dan mogok kerja disebabkan penolakan terhadap pemberlakuan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang sistem pengupahan karena penentuan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi (IPE) yang digunakan berdasarkan kebutuhan pusat sedangkan kebutuhan masing-masing wilayah berbeda, serta penerapan struktur skala upah berdasarkan peraturan menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 1 Tahun 2017 tenang Struktur skala upah yang mana apabila suatu perusahaan tidak mempunyai struktur skala upah, Pemerintah seolah olah tidak mengambil tindakan apa-apa/sanksi.
4. **Keamanan**:
5. Kejahatan yang bersifat konvensional dan menonjol masih akan terjadi pada tahun 2018 diantaranya adalah Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi / sajam, penganiayaan, jambret serta Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong / merusak gembok pintu / pagar, congkel jendela/ pintu, merusak atap serta meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba;
6. potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan radikalisme melaui sarana media massa maupun elektronik yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kekerasan di masyarakat Prov. Kepri;
7. tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Prov. Kepri sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri;
8. sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungan masyarakat;
9. kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
10. rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
11. belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum;
12. permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan;
13. Kejahatan yang melibatkan warga Negara Asing (WNA) baik sebagai pelaku maupun korban.
14. **SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Rorena Polda Kepri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat di analisa dari faktor intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

1. **Kekuatan (Strenght)**
2. Personel Rorena Polda Kepri saat ini jumlahnya 24 personel terdiri dari 20 personel Polri dan 4 Personel Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki semangat kerja dan dedikasi yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas – tugas Rorena dapat terselesaikan tepat pada waktunya;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Rorena Polda Kepri berupa :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | KUANTITAS | SATUAN |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Kendaraan R4 | 2 | Unit |
| 2 | Mesin Fotocopy | 1 | Buah |
| 3 | Ac Split | 11 | Buah |
| 4 | Kamera digital | 1 | Buah |
| 5 | Pesawat telepon | 5 | Buah |
| 6 | Faximile | 3 | Buah |
| 7 | PC Unit | 16 | Buah |
| 8 | Laptop | 9 | Buah |
| 9 | Note book | 5 | Buah |
| 10 | Printer | 10 | Buah |

1. Tersedianya dukungan anggaran Rorena yang telah terdistribusi ke Bag dan Subbag, sehingga para Bag dan Subbag sejak dini telah membuat rencana kegiatan yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
2. Terpenuhinya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Rorena telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
3. **Kelemahan (Weakness)**
4. Jumlah personel Rorena Polda Kepri belum sesuai DSP sebanyak 50 personel, saat ini jumlah riil baru 24 personel (terpenuhi 48%) sehingga beban kerja personel Rorena lebih besar dari yang seharusnya;
5. Kurangnya jumlah personel yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang perencanaan umum dan anggaran dari 24 personel baru 10 personel yang memiliki Dikjur/Dikbangspes/Pelatihan bidang perencanaan dan 14 personel yang belum mengikuti Dikjur/Dikbangspes/Pelatihan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai bila dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, seperti Ranmor roda 2, Ranmor roda 4, proyektor, layar monitor, internet, dan printer;
7. Belum tersedianya rumah dinas bagi personel Rorena Polda Kepri, kecuali Karorena.
8. **Peluang (Opportunities)**
9. Terjalinnya hubungan yang baik antar satker jajaran Polda Kepri dengan Rorena, sehingga memudahkan koordinasi dalam pemenuhan data dukung penyusunan produk-produk perencanaan;
10. Adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat, Pemprov Kepri dan Instansi terkait lainnya terhadap pelaksanaan tugas Polda Kepri, sehingga dapat meningkatkan kinerja Polda Kepri;
11. Adanya dukungan dan kerjasama dengan Kanwil DJBP dan KPPN wilayah kerja Kepri dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan jajaran Polda Kepri.
12. **Ancaman/Kendala (Threats)**

Keterbatasan sarana informasi dan komunikasi (jaringan telepon, faximile dan internet) disatuan kewilayahan khususnya wilayah yang jauh dari Mapolda Kepri seperti Polres Natuna, Kep. Anambas, Lingga dan Bintan sehingga dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan laporan dan penyampaian informasi penting berkaitan dengan tugas-tugas Rorena Polda Kepri;

Keterbatasan jumlah dan kualitas personel pengemban fungsi perencanaan Satker jajaran Polda Kepri, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas perencanaan dan anggaran;

Anggaran jaldis dikesatuan kewilayah belum mencukupi dalam mengikuti kegiatan rapat penyusunan dan pengendalian program dan anggaran di Polda.

1. **Permasalahan**

Permasalahan yang ada di Satker Rorena Polda Kepri, antara lain :

1. Keterbatasan jumlah SDM Rorena khususnya PNS Gol II/III dapat menghambat bahkan mengganggu pelaksanaan tugas-tugas yang semakin berat, karena harus merangkap tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab orang lain;
2. Secara kualitas SDM Birorena masih banyak yang belum memiliki kualifikasi fungsi perencanaan (Dikjur perencanaan, susfungren, pelatihan fungsi perencanaan) sehingga sangat terkendala dari segi kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan produk-produk perencanaan yang berkualitas;
3. Keterbatasan sarana informasi dan komunikasi (jaringan telepon, faximile dan internet) di satuan kewilayahan khususnya wilayah yang jauh seperti Polres Natuna,Kep. Anambas dan Lingga dapat menghambat ketepatan laporan dan penyampaian informasi penting berkaitan dengan tugas-tugas Rorena Polda Kepri.
4. TUJUAN DAN SASARAN

Pelaksanaan tugas Rorena sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 pasal 33, dipengaruhi oleh berbagai aspek meliputi kehidupan masyarakat dan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Rorena Polda Kepri menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan pada T.A. 2019 sebagai berikut :

1. Visi dan Misi
2. Visi dan Misi Polda Kepri
3. Visi

Terwujudnya Polda Kepri yang Profesional, Modern dan Terpercaya.

1. Misi
2. mewujudkan postur Polda Kepri yang ideal, efektif dan efisien;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Kepri melalui pendidikan dan latihan;
4. meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
5. meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
6. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
7. meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polda Kepri yang profesional dan akuntabel;
8. Mengelola keamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas.
9. Visi dan Misi Rorena Polda Kepri
10. Visi

Terwujudnya Rorena Polda Kepri yang Profesional, Modern dan Terpercaya.

1. Misi
2. mewujudkan postur anggaran Polda Kepri yang ideal, efektif dan efisien;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia personel Rorena Polda Kepri melalui pendidikan dan latihan;
4. mewujudkan produk perencanaan dan anggaran satker jajaran Polda Kepri yang berkualitas;
5. terwujudnya pengendalian program dan anggaran Satker jajaran Polda Kepri;
6. meningkatkan pengawasan program dan anggaran Satker jajaran Polda Kepri dengan bekerjasama fungsi pengawasan Polda Kepri;
7. terlaksananya pembinaan fungsi perencanaan dan anggaran terhadap Satker-Satker jajaran Polda Kepri;
8. terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan Satker/instansi terkait yang berhubungan dengan fungsi perencanaan, anggaran dan pengawasan;
9. terwujudnya pengembangan kesatuan di wilayah Polda Kepri;
10. terlaksananya Reformasi Birokrasi Polri pada seluruh satker jajaran Polda Kepri.
11. Tujuan
12. Tujuan Polda Kepri
13. terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polda Kepri;
14. terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN di wilayah Polda Kepri;
15. terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian di wilayah Polda Kepri.
16. Tujuan Rorena Polda Kepri
17. terwujudnya pembinaan dan penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran*;*
18. terwujudnya perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda Kepri;
19. terwujudnya pemantauan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran, penerapan sistem dan manajemen organisasi;
20. terwujudnya pembinaan, penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda Kepri;
21. terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di Polda Kepri.
22. Sasaran Prioritas
23. Sasaran Prioritas Polda Kepri T.A. 2018

Berdasarkan tahapan capaian Renstra Polda Kepri Tahun 2018 dengan capaian: ”Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polda Kepri guna menghadapi berbagai tantangan tugas”, maka sasaran prioritas Polda Kepri tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. ***Pertama*** “Peningkatan kualitas pelayanan Polda kepri berbasis Teknologi Informasi”;
2. ***Kedua*** “Terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polda Kepri dan Terselenggaranya Pengamanan Pemilu 2019 secara aman, tertib, lancar dan demokratis”;
3. ***Ketiga*** “Pemetaan aktifitas Siber, penegakan hukum kejahatan Siber dan produksi konten kreatif dalam rangka merawat ke-bhinekaan di media sosial”;
4. ***Keempat*** “Peningkatan Profesionalisme Polda Kepri dalam penegakkan hukum kejahatan Narkoba, Korupsi dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat”;
5. ***Kelima*** “Peningkatan Fasilitas Aparatur Polda Kepri dan pelayanan Kepolisian di lokasi prioritas pada pulau-pulau terluar berpenghuni, yang ada di wilayah hukum Polda Kepri”;
6. ***Keenam*** ”Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang efektif untuk mendorong penguatan Reformasi Birokrasi”;
7. ***Ketujuh*** “Penggelaran personel dan Sarpras Polda Kepri diwilayah perairan, kepulauan dan perbatasan”;
8. ***Kedelapan*** “Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi, kesejahteraan Aparatur Polda Kepri dan Manajemen internal Polda Kepri yang mantap”.
9. ***Kesembilan*** “Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah Daerah’’.
10. Sasaran Prioritas Rorena Polda Kepri T.A. 2019
    1. Pertama “Terpenuhinya secara bertahap kebutuhan minimal personel Rorena Polda Kepri sesuai DSP”
    2. Kedua “Meningkatnya profesionalisme personel Rorena Polda Kepri dan pemantapan manajemen internal Rorena Polda Kepri”;
    3. Ketiga “Meningkatnya kesejahteraan personel Rorena Polda Kepri”;
    4. Keempat “Tergelarnya sarana informasi dan Komunikasi di wilayah diperairan, kepulauan dan perbatasan Satwil jajaran Polda Kepri”;
    5. Kelima “Menguatnya sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan Rorena Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”;
    6. Keenam “Meningkatnya kerja sama dengan instansi terkait dibidang Perencanaan Umum dan Anggaran”;
    7. Ketujuh “Meningkatnya kualitas pelayanan bidang Perencanaan Umum dan anggaran ke Satker jajaran Polda Kepri”.
11. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI T.A. 2019
12. **Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepri Tahun 2019**

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kepri Tahun 2019 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. sasaran prioritas **“Peningkatan kualitas pelayanan Polda kepri berbasis Teknologi Informasi”***,* dicapai melalui kebijakan dan strategi**:**
2. ***Arah kebijakan*** “Pelayanan masyarakat dengan system yang berbasis Teknologi Informasi” dengan ***strategi***:
3. evaluasi system pelayanan public Polda Kepri yang berbasis Teknologi Informasi;

b) Peningkatan, …

1. peningkatan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan system pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi;
2. peningkatan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara *online*;
3. peningkatan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain *online;*
4. peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara online;
5. peningkatan kualitas pelayanan dibidang Binmas dengan penerbitan KTA dan ijazah Satpam dan SIO (Surat ijin operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan);
6. peningkatan Kualitas Ranmor (GPS/SPOT) dalam rangka Harkamtibmas;
7. peningkatan pelayanan SPKT (aplikasi);
8. peningkatan pelayanan SIM dan SKCK antar pulau antar desa menggunakan kapal Satpolair di wil hukum Polda Kepri (wilayah perairan);
9. peningkatan kualitas dibidang kesehatan dalam pendaftaran Pasien Online.
10. ***Arah kebijakan*** “Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik” dengan ***strategi***:
11. meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian *reward and punishment* secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan;
12. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan public Polda Kepri khusunya pada Satuan Penyelengara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK serta pelayanan Kesehatan;
13. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan public Polda Kepri pada pelayanan SPKT;
14. Transparansi dalam Alur pelayanan SPKT, SIM dan SKCK (pembuatan banner, sosialisasi, dan Brosur);
15. Menempatkan CCTV di sentra pelayanan dengan pusat control di Itwasda, Bidpropam, Sie Propam.
16. ***Arah kebijakan*** “Peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian (RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan ***strategi***:
    * + 1. penyelidikan dan penyidikan terhadap korban yang berjenis kelamin perempuan dan anak oleh penyidik wanita (diharapkan utk tidak mengenakan biaya cek kesehatan kepada korban, biaya psikolog);
        2. meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak UPPA;
        3. terwujudnya ruangan dan sarana pelayanan yang ada di RPK disesuaikan dengan standar fungsinya;
        4. mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;
        5. membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai PPA dengan pelibatan ahli/konsultan*.*
17. ***Arah kebijakan*** “Percepatan *quick respons* Kepolisian” dengan ***strategi***:
18. Peningkatan turjawali yang mengutamakan patroli dialogis;
19. Peningkatan almatsus Patroli Polda Kepri yang berbasis Teknologo Informasi;
20. menyusun/revisi SOP tentang *Quick Respons* Kepolisian di wilayah hukum Polda Kepri;
21. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Panic button;
22. Penyiapan ruang khusus operator Quick Respon.
23. Sasaran prioritas **“Terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polda Kepri dan Terselenggaranya Pengamanan Pemilu 2019 secara aman, tertib, lancar dan demokratis”**dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
24. ***Arah kebijakan***“Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial” dengan ***strategi*** :
25. pelaksanaan kegiatan intelijen di wilayah hukum Polda Kepri melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, pembentukan dan pembinaan jaringan serta kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan Dinas/Instansi terkait;
26. peningkatan kemampuan unit opsnal intelijen baik kualitas maupun kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen mulai tingkat Polda sampai dengan Polsek;
27. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Latihan secara berkala dan berkesinambungan.
28. ***Arah kebijakan***“Peningkatan Kemampuan Penanganan *Flash Point* dengan Mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi Penggalangan Intelijen” dengan ***strategi***:

peningkatan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam melakukan pemetaan potensi konflik di satuan wilayah yang bersinergis dengan Bhabinkamtibmas;

meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam ***menjaga Kamtibmas***;

Peningkatan tunjangan Bhabinkamtibmas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah tugasnya untuk meningkatkan mutu pelayanan;

Peningkatan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi wilayah tugas.

1. ***Arah kebijakan***“Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peran Bhabinkamtimas di desa/kelurahan” dengan ***strategi***:
2. Meningkatkan kualitas pertemuan petugas BhabinkamtibmasPolmas dengan komunitas yang ada di masyarakat;
3. memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang berprestasi;
4. memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa;
5. mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan dijalan untuk membantu pengamanan lingkungan;
6. menambah jumlah anggota Bhabinkamtibmas secara bertahap dalam rangka mewujudkan penggelaran satu Polisi (Bhabinkamtibmas) satu desa/kelurahan;
7. Penambahan sarana prasarana berupa R2 jenis Trail, Speed Boat C3, alat komunikasi berupa HT dan Sound System Portable;
8. memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila;
9. Usulan penambahan biaya operasional para petugas Bhabinkamtibmas khususnya di wilayah kepulauan, perairan dan perbatasan/pulau terluar.
10. ***Arah kebijakan***“Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)darat dan perairan/laut” dengan ***strategi***:
11. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
12. penanganan kecelakaan lalu lintas secara profesional dengan berbasis teknologi darat dan perairan/laut;
13. melaksanakan kajian *black spot* dan *trouble spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas darat dan perairan/laut;
14. membangun RTMC dan TMC darat dan perairan/laut;
15. membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum;
16. melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (*life jacket*);
17. melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan Basarnasda Provinsi Kepri serta *stakeholder* lainnya untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan di perairan/laut;
18. melaksanakan operasi DVI (Disaster Victim OfIdentification) dalam mengidentifikasi korban laka laut dan bencana alam yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
19. ***Arah kebijakan***“Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas” dengan ***strategi***:
20. melaksankan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas;
21. menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat;
22. melaksanakan *Quick Respons* setiap permasalahan yang ada di masyarakat;
23. meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan Lembaga Negara, perwakilan asing, pengamanan VIP serta pengamanan *event*Daerah, Nasional maupun internasional;
24. mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada kesatuan Brimob Polda Kepri untuk setiap saat siap digerakkan ke daerah rawan dengan sarana dan prasarana yang cepat baik melalui udara, laut maupun darat;
25. memperkuat perlindungan anak dan wanita dengan pemberdayaan Polwan;
26. Pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkhis.
27. ***Arah kebijakan*** “Pengamanan PemiluTahun 2019” dengan ***strategi***:
28. melaksanakan *mapping* potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawanpada Pemilu 2019;
29. melaksanakan koordinas dengan Penyelenggara dan peserta Pemilu 2019 (KPUD, Bawaslu/Panwaslu dan peserta Pemilu);
30. melaksanakan operasi Kepolisian dengan sandi “Operasi Mantap Brata 2019 “dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019 di wilayah hukum Polda Kepri;
31. mempersiapkan asta siap Pemilu Tahun 2019;
32. penanganan Tindak Pidana PemiluTahun 2019 dilakukan bersama sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra GakkumduBawaslu dan Panwaslu;
33. mempersiapkan system informasi teknologi untuk mendukung pengamanan Pemilu Tahun 2019;
34. melaksanakan Anev pelaksanaan Pam Pemilu Tahun 2019;
35. membentuk kompi gabungan (Kompi kerangka dalmas) dalam rangka pengaman Pemilu Tahun 2019;
36. melaksanakan pelatihan Sispamkota (peragaan) dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2019;
37. penyusunan rencana kebutuhan Anggaran Pam Pemilu disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan/pulau terluar.

1. Sasaran Prioritas **“Pemetaan aktifitas Siber, penegakan hukum kejahatan Siber dan produksi konten kreatif dalam rangka merawat ke-bhinekaan di media sosial”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
2. ***Arah kebijakan***“Pemetaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan Siber yang dilakukan oleh jaringan di Daerah Kepri, Nasional maupun internasional” dengan ***strategi***:
3. Pelaksanaan kegiatan kontra terhadap kejahatan media dan telekomunikasi;
4. Pembentukan Satgas Patrol Cyber Polda Kepri yang bertugas melakukan patrol(pengawasan) terhadap semua konten yang ada di dunia maya;
5. Pelaksanaan patrol data center;
6. Pendataan terhadap serangan data center;
7. Pengembangan jaringan komunikasi dengan instansi terkait;
8. Profiling terhadap akun media sosial yang menebar ujaran kebencian (hoax) sara dan lain-lain.
9. ***Arah kebijakan***“Peningkatan system keamanan Siber”dengan ***strategi***:
10. Membangun tekhnologi intelijen Polda Kepri di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sesuai dengan tantangan tugas dengan mendistribusikan dan mengoperasionalisasikan Alsus intelijen keamanan dalam system yang terintegrasi sampai tingkat Polsek;
11. Pencegahan terhadap hacker yang akan membobol situs resmi, denganmeningkatkan security dan maintenance melalui update PC software, hardware;
12. Pengembangan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kejahatan Siber;
13. Peningkatan kerjasama dengan vendor atau provider.
14. ***Arah kebijakan*** “Peningkatan produksi konten kreatif dan narasi perdamaian’’ dengan ***strategi***:
15. Pembuatan desain kreatif program Polda Kepri dalam bentuk visual, audio visual, naskah,pemberian pesan dan himbauan Kamtibmas, mengangkat kisah anggota Polda Kepri yang inspiratif dan edukasi yang bertujuan untuk membangun citra Polri;
16. Pengembangan dan pembuatan narasi perdamaian, melalui deklarasi dan kerjasama (MOU) serta tulisan tentang Polri;
17. Peningkatan jumlah follower serta militansi followers terhadap media social Polri.
18. ***Arah kebijakan*** “Peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dalam upaya mengelola media sosial” dengan ***strategi***:
19. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran organisasi masyarakat/komunitas masyarakat agar berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitarnya tentang pentingnya menjaga Pancasila demi keutuhan NKRI;
20. Penyuluhan dan pembinaan langsung kepada generasi muda mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengikutsertakan tenaga pendidik, aktivitas peduli pendidikan dan akademisi untuk menyuarakan anti hoax;
21. Peningkatan kerjasama dalam rangka penanganan kejahatan Siber.
22. Sasaran prioritas **“Peningkatan Profesionalisme Polda Kepri dalam penegakkan hukum kejahatan Narkoba, Korupsi dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat”,** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
23. ***Arah kebijakan*** “Peningkatan Profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik” dengan ***strategi***:
24. mengintensifkan pemberantasaan 4 jenis kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kelompok marginal;
25. pemberantasaan terhadap kejahatan diwilayah perairan seperti Narkoba, *illegal fishing,* perdagangan orang, pertambangan liar dilaut*,* perompakan dilaut dan tindak pidana perairan lainnya;
26. membangun kemampuan pemeriksaan barang bukti (BB) dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam suatu tindak pidana secara ilmiah/*Criminal Scientific Investigation* (SCI) pada Puslabfor/ Pusinafis dalam proses pengungkapan kasus;
27. peningkatan kemampuan SDM melalui diklat baik penyelidikan dan penyidikan.
28. ***Arah kebijakan*** “Proses Penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus” dengan ***strategi***:
29. menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan;
30. peningkatan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
31. mengusulkan peningkatan anggaran lidik sidik yang cukup sesuai karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sampai tingkat Polsek;
32. peningkatan kemampuan SDM melalui diklat baik penyelidikan dan penyidikan.
33. ***Arah kebijakan*** “Peningkatan kemampuan penyidik” dengan ***strategi***:
34. mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal;
35. mengembangkan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum
36. mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai *Scientific Crime Investigation;*
37. Melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana;
38. Pendataan kepada setiap penyidik harus pendidikan S-1 dan memiliki sertifikasi penyidikan.
39. ***Arah kebijakan*** “Penanganan kebakaran hutan dan lahan” dengan ***strategi***:
40. Meningkatkan sinergitas/kerjasama dengan Pemda (Dinas kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian) dan instansi terkait lainnya, dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kepri;
41. Melakukan pemetaan terhadap hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan.
42. Sasaran prioritas “**Peningkatan Fasilitas Aparatur Polda Kepri dan pelayanan Kepolisian di lokasi prioritas pada pulau-pulau terluar berpenghuni, yang ada di wilayah hukum Polda Kepri**”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
43. ***Arah kebijakan*** “Meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan personel Polda Kepri di perbatasan/Pulau Terluar berpenghuni” dengan ***strategi***:
44. Melakukan pendataan daerah-daerah di wilayah hukum Polda Kepri yang berhak mendapatkan tunjangan khusus perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;
45. Mengusulkan tunjangan khusus perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni bagi personel Polda Kepri;
46. Mengusulkan pembangunan Polsek/Polsubsektor di wilayah perbatasan;
47. Peningkatan Sarpras patroli perbatasan;
48. Pemberian reward kepada personel Polda Kepri berprestasi yang betugas di wilayah perbatasan/pulau terluar berpenghuni.
49. ***Arah kebijakan*** “Terlaksananya layanan Kepolisian dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas” dengan ***strategi***:
50. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran, Sarpras dan personel yang ideal di lokasi Prioritas pada wilayah perbatasan dalam wilayah hukum Polda Kepri;
51. Melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di pulau-pulau terluar dan pengamanan pada lokasi prioritas (Lokpri);
52. Melaksanakan kegiatan preemtif, preventif dan represif di perairan perbatasan/Pulau Terluar berpenghuni;
53. pembinaan terhadap masyarakat di pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas (Lokpri);
54. Peningkatan Turwali di perairan perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni.
55. SasaranPrioritas **“Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang efektif untuk mendorong penguatan Reformasi Birokrasi”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
56. ***Arah kebijakan*** “Pelaksanaan system Manajemen Kinerja” dengan ***strategi***:
57. mengembangkan sistem pengawasan berbasis *online*;
58. mengoptimalkan pelaksanaan wasrik pada bidang operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan;
59. meningkatkan maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan;
60. meningkatkan kapabilitas APIP Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan.
61. ***Arah kebijakan*** “penanganan public complain” dengan ***strategi***:
62. penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal yang cepat;
63. Penerapan system penanganan pengaduan masyarakat secara online;
64. penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK RI pada satker di lingkungan Polda Kepri yang cepat;
65. Peningkatan kompetensi personel, sistem/struktur penanganan public complain yang terintegrasi.
66. ***Arah kebijakan*** “Penguatan Saber Pungli” dengan ***strategi***:
67. menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Kepri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
68. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Polda Kepri;
69. mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polda Kepri;
70. mengintensifkan tim Saber Pungli Polda kepri;
71. mengoptimalkan pengamanan internal ditempat pelayanan Polda Kepri;
72. Peningkatan sarana/prasarana pengawasan Saber Pungli.
73. ***Arah kebijakan*** “Pencegahan Korupsi di internal Polda Kepri” dengan ***strategi***:
74. peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polda Kepri yang wajib melapor;
75. internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polda Kepri;
76. pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha atau bisnis personel Polda Kepri;
77. mengoptimalkan*whistle blower system* di lingkungan Polda Kepri;
78. Pencegahan gratifikasi di lingkungan Polda Kepri;
79. Menggiatkan transaksi non tunai.
80. ***Arah kebijakan*** “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri” dengan ***strategi***:
81. peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan;
82. pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polda Kepri;
83. Mengusulkan Satker di lingkungan Polda Kepri ke Mabes Polri untuk dilakukan penilaian zona integritas menuju WBK;
84. Peningkatan pengukuran ITK (Indeks tata kelola) sampai kepada tingkat Polsek.
85. Sasaran prioritas **“Penggelaran personel dan Sarpras Polda Kepri diwilayah perairan, kepulauan dan perbatasan”**dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
86. ***Arah kebijakan***“Terwujudnya keamanan di wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan dalam wilayah hukum Polda Kepri” dengan ***strategi***:
87. melaksanakan patroli di wilayah perairan/pulau terluar berpenghuni (merangkai pulau menyatukan hati), Binmas perairan dan sambang nusa sampai pulau-pulau terluar berpenghuni;
88. meningkatkan pengamanan di wilayah perairan Polda Kepri;
89. meningkatkan patroli di wilayah perairan perbatasan Negara;
90. koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov Kepri dan Bea Cukai;
91. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Police Diraja Malaysia (PDRM) dan Police Coast Guard Singapore (PCG).
92. ***Arah Kebijakan***“Meningkatkan Sarpras perairan, kepulauan dan perbatasan” dengan ***Strategi*:**
93. pemenuhan peralatan khusus perairan, kepulauan dan perbatasan;
94. mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor serta pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni secara bertahap;
95. Mengusulkan pembangunan Mako Subden/Kompi Pelopor Brimob untuk BackUp Satwil dalam rangka percepatan pergeseran pasukan di wilayah kepulauan.
96. Mengusulkan pembangunan Dermaga/pangkalan kapal pada setiap Polres/Polsek/Polsubsektor;
97. mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepri;
98. Pergelaran Alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegritas antara Polda dan Polres dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil presiden dan legislatif Tahun 2019;
99. Penguatan sistim trangking untuk kelancaran trafic jaringan komunikasi radio.
100. ***Arah Kebijakan***“Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan Alat Materiil Khusus (Almatsus) Polda Kepri” dengan ***Strategi*:**
101. Penyusunanstandardisasi perlengkapan Polda Kepri yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah sebagai wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan yang diselaraskan dengan tantangan tugas;
102. mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada;
103. mengusulkan pengadaan Almatsus yang modern dan berteknologi tinggi guna menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi;
104. menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului dengan studi kelayakan.
105. ***Arah kebijakan*** “Terwujudnya pemenuhan Rumah Dinas danpengadaan perumahan bagi personel Polda Keprit” dengan **strategi**:
106. mengusulkan pemenuhan kebutuhan rumah dinas anggota Polda Kepri;
107. Menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat;
108. Mempermudah personel Polda Kepri untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang dan Developer.
109. Sasaran prioritas **“Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi, kesejahteraan Aparatur Polda Kepri dan Manajemen internal Polda Kepri yang mantap”**dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
110. ***Arah kebijakan*** “Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polda kepri” dengan ***strategi***:
111. mengirim personel Polda Kepri untuk mengikuti Dikbangspes fungsi;
112. melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian;
113. pelatihan peningkatan kemampuan Kepolisian perairan, kepulauan dan perbatasan;
114. pelatihan revolusi mental;
115. melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polda Kepri;
116. pelaksanaan pola rekruitmen Polri yang BETAH;
117. memberikan peluang utk melanjutkan Pendidikan di luar Polri (dikum perguruan tinggi);
118. melaksanakan Pendidikan pelatihan dan pengembangan SDM kesehatan untuk memenuhi akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.
119. ***Arah kebijakan*** “Melaksanakan pembinaan karier berdasarkan *Meryt System* dan rekam jejak” dengan ***strategi***:
120. Melaksanakan rekam jejak setiap Personel Polda Kepri dan mengintegrasikan dengan Satker penanggung jawab komponen rekam jejak;
121. seleksi pendidikan pengembangan umum Polri yang transparan dan akuntabel;
122. menyelenggarakan uji kompetensi jabatan dengan menggunakan system Computer Assisted Test (CAT);
123. melaksanakan assesment jabatan dalam rangka pembinaan karier Personel Polda Kepri secara transparan dan akuntabel;
124. Menempatkan personel sesuai dengan kompetensi;
125. Pelayanan konseling psikologis berkala/keliling bagi seluruh personel polda keprimengirim personel Polda Kepri untuk mengikuti Dikbangspes fungsi.
126. ***Arah kebijakan*** “Melaksanakan penerimaan anggota Polri” dengan ***strategi***:
127. Menyusun Renbut minimal personel Polda Kepri sesuai beban kerja dan karakteristik wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan untuk 1 Tahun ke depan;
128. Mengusulkan penambahan personel Polda Kepri ke Mabes Polri sesuai kebutuhan;
129. menyelenggarakan kampanye penerimaan anggota Polri melalui Taruna Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama dan PNS Polri secara *massive* sepanjang hari sepanjang Tahun untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas;
130. Melaksanakan pembinaan sejak dini putra daerah (anak Pulau) untuk mampu bersaing dalam rekruitmen anggota Polri dengan tetap mengutamakan kualitas;
131. Menjaring calon yang memiliki kemampuan di bidang perairan;
132. Melaksanakan seleksi Diktuk anggota Polri dalam pentahapannya dengan menggunakan *system oneday service and one day result.*
133. ***Arah kebijakan*** “Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT disetiap satuan kerja” dengan ***strategi***:
134. mengintegrasikan system teknologi informasi di Satker jajaran Polda Kepri;

b) penambahan …

1. penambahan kapasitas Bandwidth untuk Satker- satker Polda dan jajaran;
2. meningkatkan penerapan system informasi manajemen melalui aplikasi *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound* (SMART);
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
4. meningkatkan pengawasan SDM;
5. meningkatkan penerapan *reward and punishment* di Satuan Kerja;
6. meningkatkan sarana dan prasarana (perangkat keras).
7. ***Arah kebijakan*** “Mengusulkan Kebutuhan Anggaran Polda Kepri yang Proporsional Sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah perairan, Kepulauan dan Perbatasan” dengan ***strategi***:
8. menyusun anggaran Polda Kepri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah perairan, kepualauan dan perbatasan;
9. mengusulkan kebutuhan anggaran Polda kepri ke Mabes Polri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah perairan, kepualauan dan perbatasan.
10. Miningkatkan sarana transportasi Laut untuk menjangkau Pulau terpencil dan terluar;
11. Meningkatkan anggaran Pendidikan dibidang Nautika pelayaran.
12. ***Arah kebijakan*** “Pengembangan organisasi Polda Kepri” dengan ***strategi***:
13. mengusulkan peningkatan Tipologi Polres dan Polsek jajaran Polda Kepri;
14. mengusulkan pembentukan Polsubsektor jajaran Polda Kepri;
15. mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta Barelang, Polres Tanjungpinang, Karimun dan Kepulauan Anambas.
16. ***Arah kebijakan*** “Meningkatkan pelayanan kesehatan personel Polda Kepri” dengan ***strategi***:
17. terwujudnya fasiltas dan penunjang medis yang memadai bagi rumah sakit Bhayangkara Polda Kepri;
18. terwujudnya peningkatan status poliklinik dan Rumkit Bhayangkara Polda kepri;
19. meningkatkan kualitas pelayanan dan perawatan kesehatan bagi personel jajaran Polda Kepri di Poliklinik dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri;
20. meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Rumah sakit dan poliklinik Polda Kepri;
21. menyelenggarakan kerja sama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik/lebih tinggi;
22. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polda Kepri;
23. menghimpun dan mendata Pegawai Negeri pada Polda Kepri dan keluarga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS);
24. melakukan perawatan dan pengawasan terhadap personel Polri yang mengalami sakit menahun;
25. meningkatkan poliklinik di satwil jajaran polda kepri.
26. ***Arah kebijakan*** “Melaksanakan program wirausaha bagi personel Polda Kepri” dengan ***strategi***:
27. Membuat program Wirausaha bagi personel Polda Kepri yang akan memasuki pensiun;
28. Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan balai latihan kerja untuk program wirausaha;
29. Bekerjasama dengan BUMN/perusahaan swasta kepada personel yang pensiun.
30. ***Arah kebijakan*** “Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi personel Polda Kepri” dengan ***strategi***:
31. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan ASABRI di Prov Kepri untuk meningkatkan pelayanan ASABRI bagi personel Polda Kepri;
32. Memfasilitasi personel Polda Kepri yang mengalami kecelakaan kerja (cacat maupun meninggal dunia) untuk mendapatkan santunan atau biaya dari ASABRI;
33. Peningkatan pelayanan untuk pengurusan personel ke ASABRI.
34. Sasaran prioritas **“Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah Daerah”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
35. ***Arah kebijakan*** “Mengoptimalkan sinergitas dengan aparat penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri” dengan ***strategi***:
36. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Singapura dan Malaysia dalam penanganan kejahatan transnasional di wilayah perairan perbatasan;
37. meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan, Pengadilan, Kumham, KPK, OJK, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea cukai) dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta penafsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
38. meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakkan ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (Penegakan Tipiring) terkait dengan Perda.
39. ***Arah kebijakan*** “meningkatkan kerjasama antar instansi terkait” dengan ***strategi***:
40. meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian;
41. Melakukan evaluasi terhadap MoU yang sudah ada;
42. mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme.
43. ***Arah kebijakan*** “Menjalin Kerjasama dengan pihak Swasta dan komponen Masayarakat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas” dengan ***strategi***:
44. menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital dan obyek tertentu lainnya / pihak swasta;
45. menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikut sertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas.
46. Menjalin kerjasama dengan *civil society* untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI;
47. ***Arah kebijakan*** “Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan *stakeholders* terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online) serta mengintensifkan penggunaan media massa dan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif” dengan ***strategi*** :
48. mewujudkan layanan informasi melalui media massa, media social dan penerangan satuan;
49. mewujudkan kerjasama dengan stakeholder pemerintahan melalui kegiatan BAKO Humas;
50. mewujudkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
51. melaksanakan viralisasi, profiling dan *counter* opini melalui media massa dan media sosial;
52. melaksanakan layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada anggota Polri dan masyarakat;
53. peningkatan produksi konten kreatif dan narasi perdamaian;
54. melaksanakan press rilis dan conferensi pers kegiatan Polda Kepri dan jajaran;
55. Penambahan biaya pembinaan wartawan.
56. **Arah Kebijakan dan Strategi Rorena Polda Kepri T.A. 2019**

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Rorena Polda Kepri Tahun 2019 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Sasaran prioritas “**Terpenuhinya secara bertahap kebutuhan minimal personel Rorena Polda Kepri sesuai DSP” dicapai melalui **kebijakan** pemenuhan Personel Rorena Polda Kepri dengan **strategi** mengusulkan penambahan personel Rorena Polda Kepri ke Biro SDM.
2. **Sasaran prioritas “**Meningkatnya profesionalisme personel Rorena Polda Kepri dan pemantapan manajemen internal Rorena Polda Kepri” dicapai melalui **kebijakan** dan **strategi** :
3. Arah ***kebijakan*** “Peningkatan kapasitas personel” dengan ***strategi*:**
4. mengusulkan personel Rorena Polda Kepri untuk mengikuti Dikbangum dan Dikbangspes fungsi perencanaan;
5. melaksanakan latihan fungsi teknis kepolisian di bidang perencanaan dan anggaran;
6. melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Rorena Polda Kepri;
7. memperkuat soliditas internal melalui internalisasi kecintaan pada organisasi, Commander Wish (fokus pada tugas), membangun komunikasi terbuka antar pimpinan dengan pimpinan , dan pimpinan dengan bawahan.
8. ***Arah kebijakan*** “Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT” ***strategi*** :
9. Mengintegrasikan system teknologi informasi di Satker Rorena Polda Kepri;
10. Penambahan kapasitas jaringan internet Rorena Polda Kepri;
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran;
12. Meningkatkan pengawasan SDM Rorena Polda Kepri;
13. Meningkatkan penerapan *reward and punishment*.
14. ***Arah Kebijakan*** “Mengusulkan Kebutuhan Anggaran Rorena Polda Kepri yang Proporsional Sesuai dengan Beban Kerja” dengan ***Strategi*** :
15. menyusun anggaran Rorena Polda Kepri sesuai dengan kebutuhan;
16. mengusulkan kebutuhan anggaran Rorena Polda Kepri.
17. **Sasaran prioritas “***Meningkatnya kesejahteraan personel Rorena Polda Kepri*” dicapai melalui **kebijakan** dan **strategi :**
18. ***Arah kebijakan*** “Meningkatkan kesehatan personel Rorena Polda Kepri” dengan ***strategi* :**
19. Mengikutsertakan Personel Rorena dalam pemeriksaan kesehatan secara berkala;
20. Mendatakan dan mengusulkan Pegawai Negeri pada Satker Rorena Polda Kepri dan keluarga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS).
21. ***Arah kebijakan*** “pemenuhan Rumah Dinas dan perumahan bagi personel Rorena Polda Kepri” dengan ***strategi*** :
22. Mengusulkan Rumah Dinas bagi personel Rorena Polda Kepri;
23. Mengusulkan personel Rorena Polda Kepri untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang/developer.
24. ***Arah kebijakan*** “Melaksanakan program wirausaha bagi personel Rorena Polda Kepri” dengan ***strategi*** Mengusulkan personel Rorena yang akan memasuki masa pensiun untuk mengikuti pelatihan wirausaha.
25. ***Arah kebijakan*** “Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi personel Polda Kepri” dengan ***strategi :***
26. Melaksanakan koordinasi dengan Ro SDM dan perwakilan ASABRI di Prov Kepri untuk meningkatkan pelayanan ASABRI bagi personel Rorena Polda Kepri;
27. Memfasilitasi personel Rorena Polda Kepri yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari ASABRI.
28. **Sasaran prioritas** “Tergelarnya sarana informasi dan Komunikasi di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan Satwil jajaran Polda Kepri” dicapai melalui **kebijakan** tersedianya dukungan anggaran sarana informasi dan Komunikasi di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan Satwil jajaran Polda Kepri dengan **strategi :**
29. Menyusun kebutuhan anggaransarana informasi dan Komunikasi di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan Satwil jajaran Polda Kepri;
30. Mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tergelarnya sarana informasi *dan* Komunikasi di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan Satwil jajaran Polda Kepri.
31. **Sasaran prioritas** *“Menguatnya sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan Rorena Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”*dicapai melalui **kebijakan** dan **strategi :**
32. Arah ***kebijakan*** “mengefektifkan kegiatan pengawasan melekat secara berjenjang di Rorena Polda Kepri” dengan ***strategi*** :
33. Melaksanakan pengendalian kehadiran personel Rorena melalui finger print
34. Melaksanakan rapat anev kinerja dan anggaran setiap bulan.
35. Arah ***kebijakan*** “Mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi” dengan ***strategi*** :
36. menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Rorena Polda Kepri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
37. meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Rorena Polda Kepri.
38. Arah ***kebijakan*** “Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK)” dengan ***strategi*** melanjutkan penguatan tata kelola kepolisian pada tujuh prinsip bidang kompetensi, keadilan, perilaku, efektifitas, transparansi, responsif dan akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) Polri.
39. Arah ***kebijakan*** “Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal” dengan ***strategi* :**
40. peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Rorena Polda Kepri yang wajib melapor;
41. internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Rorena Polda Kepri;
42. pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha atau bisnis personel Rorena Polda Kepri;
43. mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Rorena Polda Kepri;
44. pengendalian gratifikasi di lingkungan Rorena Polda Kepri.
45. ***Arah*** kebijakan “Melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker” dengan ***strategi***:
46. peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan;
47. pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polda Kepri;
48. Mengusulkan Satker di lingkungan Polda Kepri ke Mabes Polri untuk dilakukan penilaian zona integritas menuju WBK.
49. **Sasaran prioritas** *“Meningkatnya kerja sama dengan instansi terkait dibidang Perencanaan Umum dan Anggaran”*dicapai dengan **Kebijakan** dan**strategi :**
50. ***Arah kebijakan*** “Mengoptimalkan sinergitas dengan instansi terkait” dengan strategi Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kanwil DJPB Prov. Kepri, KPPN Batam dan Tanjungpinang.
51. Arah kebijakan “Mengoptimalkan Kerja sama antar instansi terkait” dengan ***strategi*** :
52. meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan RBP di Polda Kepri;
53. Melakukan evaluasi terhadap MoU yang sudah ada.
54. **Sasaran prioritas** *“Meningkatnya kualitas pelayanan bidang Perencanaan Umum dan anggaran ke Satker jajaran Polda Kepri”*dicapai dengan **Kebijakan** dan **strategi :**
55. Arah **kebijakan** “Perbaikan kualitas pelayanan penyusunan perencanaan program dan anggaran” dengan **strategi** :
56. Memberikan pembinaan teknis ke Satker jajaran Polda Kepri;
57. Membuka ruang konsultasi bidang perencanaan umum dan anggaran.
58. Arah **kebijakan** “meningkatkan kualitas pengendalian program dan anggaran” dengan **strategi:**
59. Memberikan pembinaan teknis ke Satker jajaran Polda Kepri;
60. Melaksanakan gelar anggaran secara berkala yaitu setiap triwulan;
61. Menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Polda Kepri dan Rorena.
62. Arah **kebijakan** “Menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda Kepri serta manajemen organisasi“ dengan **strategi:**
63. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Polda dan Rorena Polda Kepri;
64. Menyusun Rencana Kerja Polda dan Rorena Polda Kepri;
65. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Polda Kepri;
66. Menyusun analisis beban kerja (ABK) satker jajaran Polda Kepri;
67. Mengusulkan peningkatan tipologi Polres jajaran Polda Kepri;
68. Mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta Barelang, Polres Tanjung Pinang, Karimun dan Kepulauan Anambas;
69. Mengusulkan pembentukan dan peningkatan tipologi Polsek dan Polsubsektor.
70. PROGRAM DAN KEGIATAN
71. Program dan kegiatan

Rorena Polda Kepri pada T.A. 2019 melaksanakan 2 (Dua) program dengan 7 (Tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Polri lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut :
2. Tujuan

Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan.

1. Kegiatan
2. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri, dengan komponen:
3. Pembayaran gaji dan tunjangan;
4. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan subkomponen :

* Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor.

1. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan, dengan subkomponen :

* Pengadaan makanan/minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/uang makan PNS;
* Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi.

1. Penyusunan Kebijakan Polri, dengan komponen:

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan, dengan subkomponen :

* Penyusunan program, anggaran dan Rencana Kerja.

1. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri, dengan komponen:

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan, dengan subkomponen :

* Kegiatan Musrenbang.

1. Reformasi Birokrasi Polri, dengan komponen:

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan, dengan subkomponen :

* Pengkajian dan analisis Reformasi Birokrasi.

1. Manajemen Anggaran, dengan komponen :
2. Dukungan operasional pertahanan dan keamanan, dengan subkomponen :
3. Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja (penyusunan usulan belanja modal T.A. 2020 Polda Kepri, Renja Rorena T.A. 2020, dan Perjanjian kinerja Polda & Rorena Polda Kepri);
4. Penyusunan dan evaluasi LKIP;
5. Sosialisasi;
6. Pemeliharaan peremajaan Website;
7. Jasa Keamanan/Kebersihan;
8. Evaluasi/laporan kegiatan;
9. Pengawasan dan pembinaan;
10. Kegiatan pembinaan;
11. Dukungan Operasional Satker.
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Polri
13. Tujuan

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.

1. Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras, dengan Subkomponen :

Operasional dan Pemeliharaan Kantor :

* Perawatan kendaraan bermotor Roda 4/6/10;
* Perawatan peralatan kantor.

1. Usulan Pagu Indikatif Rorena Polda Kepri T.A. 2019

Sesuai rencana program dan kegiatan tersebut diatas, pengajuan Pagu Indikatif Rorena Polda Kepri pada T.A. 2019, sebagai berikut :

| **NO** | **NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN** | **RENDUKGAR PER GIAT** | **RENDUKGAR PER PROGRAM** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1. | Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Polri lainnya |  | Rp 3.811.650.000,- |
| Kegiatan : |  |  |
| 1. Dukungan Pelayanan internal perkantoran Polri | Rp 2.528.407.000,- |  |
| 1. Penyusunan Kebijakan Polri | Rp 49.948.000,- |  |
| 1. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri | Rp 150.000.000,- |  |
| 1. Reformasi Birokrasi Polri | Rp 64.730.000,- |  |
| 1. Manajemen Anggaran | Rp 1.018.565.000,- |  |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Polri |  | Rp 75.440.000,- |
|  | 1. Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras | Rp 75.440.000,- |  |
| **JUMLAH** | | | **Rp 3.887.090.000,-** |

1. PENUTUP
2. Penutup

Demikian Rencana Kerja Satker Rorena Polda Kepulauan Riau T.A. 2019 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di : Batam

pada tanggal : Juli 2018

KEPALA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

POLDA KEPULAUAN RIAU

K. BUDI YUWONO, S.H

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65030623